



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. KURMAWAN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 756450

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.685.200.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2.	Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 235.200.000		
3.	Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	66.000.000
1.	MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2.	MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
3.	MOTOR, HONDA SPD MOTOR R2 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	312.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	439.000.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	2.502.200.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.502.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUSI SUSANTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 990528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	85.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
85.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.951.403
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	99.951.403
III. HUTANG	Rp.	109.143.934
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-9.192.531

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEMITA BUDI RADITYANINGRUM**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **140560**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 62.000.000

1. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 24.000.000
2. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
3. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 134.550.000

III. HUTANG Rp. 246.719.219

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -112.169.219

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.